

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD KECAMATAN AYAH

## KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2022

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan OPD KECAMATAN AYAH disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada Kantor Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

#### B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Berwibawa dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambatan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen;
23. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 105 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen

### C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan laporan keuangan SKPD
	1.2	Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3	Sistematika Penulisan Catatan atas laporan keuangan SKPD
Bab II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD	
	2.1	Ikhtisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
	2.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab III	Penjelasan Pos -pos Laporan Keuangan SKPD	
	3.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD :
		3.1.1 LRA

		3.1.2 L O
		3.1.3 Neraca
		3.1.4 LPE
		3.1.5 CALK
	3.2	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas yang menggunakan basis akrual.
Bab IV	Penjelasan dan informasi-informasi non keuangan	
Bab V	Penutup	

## BAB II

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

#### A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

##### a. Pendapatan

Kecamatan Ayah pada tahun 2022 tidak ada target pendapatan

##### Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA

NO	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (RP)	Realisasi 2022 (Rp)	(Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	Tidak ada	Tidak ada	0	0	0	Tidak ada

##### b. Belanja

Realisasi Belanja TA 2022 sebesar Rp. 2.279.391.979,- dari anggaran sebesar Rp. 2.419.180.000,- atau mencapai 94,22 %. Dan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp. 2.307.768.460,- dari anggaran sebesar Rp 2.512.186.000,- atau mencapai 91,86 % sehingga realisasinya mengalami kenaikan sebesar 2,36 %.

##### 1. Realisasi Belanja Per Akun

Rincian realisasi belanja per akun disajikan sebagai berikut :

URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN T.A. 2022	REALISASI T.A. 2022	PROSEN TASE %
<b>B. BELANJA</b>			
<b>Belanja Operasi</b>			
1. Belanja Pegawai	2.001.053.000,-	1.865.776.705,-	93,24 %
2. Belanja Barang	414.327.000,-	409.815.274,-	98,91 %
3. Belanja Hibah	0,00	0,00	0
4. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>2.415.380.000,-</b>	<b>2.275.591.979,-</b>	<b>94,21 %</b>
<b>Belanja Modal</b>			
1. Belanja Modal Tanah	-	-	
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.800.000,-	3.800.000,-	100 %

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	
4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>3.800.000,-</b>	<b>3.800.000,-</b>	<b>100 %</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.419.180.000,-</b>	<b>2.279.391.979,-</b>	<b>94,22 %</b>

## 2 Realisasi Belanja Per Kegiatan

NO	URAIAN JENIS BELANJA PER KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN T.A. 2022	REALISASI T.A. 2022	PROSENT ASE %
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
	<i>Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah</i>			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,-	5.000.000,-	100 %
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,-	4.399.500,-	87,99 %
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.976.185.000,-	1.846.585.776,-	93,44 %
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27.000.000,-	25.784.100,-	95,50 %
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,-	4.997.000,-	99,94 %
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000,-	19.887.000,-	99,44%
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,-	4.998.850,-	99,98 %
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.600.000,-	2.600.000,-	100%
9	Kegiatan Penyediaan Bahan Material	15.000.000,-	14.957.200,-	99,71%
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,-	4.740.000,-	94,80%
11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.000.000,-	1.988.000,-	99,40%
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>			

12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	10.000.000,-	9.953.000,-	99,53%
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>			
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,-	1.000.000,-	100%
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,-	38.276.873,-	95,69%
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.000.000,-	31.998.000,-	99,99%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.000.000,-	36.988.050	99,91%
17	Pemeliharaan Mebel	10.000.000,-	10.000.000,-	100%
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	3.750.000,-	3.750.000,-	100%
19	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.645.000,-	11.643.500,-	99,99%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</b>			
20	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Usaha	91.000.000,-	89.610.100	98,47%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>			
21	Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.000.000,-	24.667.500,-	98,67%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			

	<b><i>Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i></b>			
22	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	25.000.000,-	23.817.101,-	95,27%
23	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.000.000,-	4.380.800,-	87,6%
24	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.000.000,-	4.636.100,-	92,72%
25	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	25.000.000,-	24.398.500,-	97,59%
26	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	20.000.000,-	19.054.900,-	95,27%
27	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10.000.000,-	9.322.200,-	93,22%
	JUMLAH=	2.419.180.000,-	2.279.414.050,-	94,22%

## **B. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN**

Hambatan yang dihadapi secara umum dalam pencapaian target anggaran yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2022 antara lain :

### **a. Belanja**

1. Belanja Rp. 2.419.180.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.279.414.050,- ( 94,22 %) tidak terserap Rp. 139.765.950,- dikarenakan adanya pegawai yang mutasi dan beberapa kegiatan yang tidak maksimal dalam penyerapan anggaran.

### BAB III

#### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

##### RINCIAN DARI PENJELASAN MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN

##### PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

#### A. Laporan Realisasi Anggaran

##### 1. PENDAPATAN

Jumlah anggaran pendapatan Kecamatan Ayah tidak ada pendapatan ( Rp. 00)

##### 2. BELANJA LRA

Realisasi belanja OPD Kecamatan Ayah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.

2.279.391.979 1,- atau 94,22% dari anggaran sebesar Rp.2.419.180.000,-

Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

##### *RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2022*

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	REALISASI 2021
<b>BELANJA OPERASI</b>	2.415.380.000,00	2.275.591.979,00	<b>94,21</b>	<b>2.248.704.310,00</b>
1. Belanja Pegawai	2.001.053.000,00	1.865.776.705,00	93,24	1.845.755.878,00
2. Belanja Barang dan Jasa	414.327.000,00	409.815.274,00	98,91	402.948.432,00
3. Belanja Hibah	0,00	0,00	0	0,00
4. Belanja bantuan Sosial	0,00	0,00	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>2.415.380.000,00</b>	<b>2.275.591.979,00</b>	<b>94,21</b>	<b>2.248.704.310,00</b>
<b>Belanja Modal</b>				
1. Belanja Modal Tanah	-	-		-
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.800.000,00	3.800.000,00	100	59.094.150,00
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-		-
4. Belanja Modal Jalan Irigasi Jaringan	-	-		-
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		-
6. Belanja Modal aset tak berwujud	-	-		-
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>97,06</b>	<b>59.094.150,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.419.180.000,00</b>	<b>2.279.391.979,00</b>	<b>94,22</b>	<b>2.307.768.480,00</b>

1. ASET LANCAR

Aset lancar merupakan kekayaan OPD Kecamatan Ayah yang terdiri di atas Kas dan Bank, piutang dan persediaan, adapun perincian aset lancar per 31 Desember 2022

a. Kas Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bank terdiri dari :

Kas dan Bank	Jumlah ( Rp. )
- Kas di Bendahara Pengeluaran	0,-
- Kas di Bank	0,-
Jumlah	0,-

b. Piutang

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang terdiri atas piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang lain- lain. Untuk Piutang di OPD Kecamatan Ayah adalah .....

c. Persediaan

Persediaan adalah barang yang dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Nilai persediaan merupakan hasil stok opname dari persediaan ATK, Barang cetakan dan lainnya yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2022.

Persediaan per 31 Desember 2022

Persediaan	Jumlah Rp.
Alat Tulis Kantor	1.175.300,-
Kertas dan Cover	783.200,-
Bahan Cetak	110.000,-
Bahan Komputer	895.000,-
Alat listrik	195.000,-
Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	248.600,-
Jumlah	3.407.100,-

## 2. ASET TETAP

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 tersaji sebesar Rp. 2.287.591.835,00 dan Rp. 1.877.975.965,00 .Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

Rincian Aset Tetap OPD Kecamatan Ayah per 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel berikut

### *Rincian Aset Tetap*

No	Jenis	T.A 2022	T.A. 2021
1	Tanah	30.996.000,00	30.996.000,00
2	Peralatan dan Mesin	1.433.305.085,00	1.023.689.215,00
3	Gedung dan Bangunan	818.290.750,00	818.290.750,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.000.000,00	5.000.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(836.315.883,00)	(836.315.883,00)
<b>JUMLAH</b>		<b>2.287.591.835,00</b>	<b>1.877.975.965,00</b>

### 3.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Ekuitas dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah asset dengan jumlah hutang. Ekuitas dana terdiri dari ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana untuk dikonsolidasikan.

1. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban lancar.  
(Piutang lancar dan penyediaan)

2. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah selisih antara jumlah dana yang diinvestasikan dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.

3. Ekuitas Dana untuk dikonsolidasikan

Ekuitas dana untuk dikonsolidasikan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana pada rekening koran.

### 3.3 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Untuk OPD Kecamatan Ayah Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dapat dibayarkan dalam waktu paling lama 12 bulan / 1 tahun setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang jangka waktu pembayarannya lebih dari 12 bulan/1 tahun setelah tanggal pelaporan.

#### EKUITAS DANA

a. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas dana lancar sebesar Rp. 00,- merupakan cadangan persediaan barang pakai habis yang terdiri dari alat tulis kantor dan barang cetakan yang belum terpakai hingga akhir 31 Desember 2022 tidak ada / nihil

b. Ekuitas Dana Infestasi

Ekuitas Dana yang diinfestasikan terdiri dari :

No.	Uraian	Jumlaj (Rp.)
1.	Diinfestasikan dalam aset tetap	0,-
2.	Infestasikan dalam aktiva lainnya	0,-
	Jumlah	0,-

Ekuitas dana investasi yang masuk yang diinvestasikan dalam aset tetap dinilai sebesar nilai aset tetap yaitu sebesar Rp. 00,-

Ekuitas dana untuk dikonsolidasikan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana pada rekening koran. Untuk SKPD Kecamatan Ayah sampai dengan akhir periode 31 Desember 2022 dana pada rekening koran Nol rupiah (Rp. 00,-)

## BAB IV

### PENJELASAN DAN INFORMASI NON KEUANGAN

#### Gambaran Umum Kecamatan Ayah

Secara geografis Wilayah Kecamatan Ayah merupakan daerah pegunungan dan secara administratif Kecamatan Ayah termasuk dalam Wilayah Kabupaten Kebumen yang mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Banyumas
- Sebelah Timur : Kecamatan Rowokele
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Cilacap

Wilayah Kecamatan Ayah terdiri dari 18 desa yaitu: 1.Desa Demangsari,2 Desa

Kedungweru,3. Desa Bulurejo,4.Desda Jatijajar,5. Desa Mangunweni, 6.Desda Candirenggo, 7.Desda Argopeni, 8.Desda Karangduwur,9.Desda Jintung, 10. Desa Sрати, 11. Desa Pasir,12, Desa Banjararjo, 13. Desa Ayah, 14. Desa Tlogosari,15. Desa Kalipoh, 16. Desa Kalibangkang,17. D Desa Aegosari, 18. Desa Watukelir, ke 18 desa tersebut semuanya merupakan daerah perbukitan dimana jarak desa yang satu dengan desa yang lain cukup jauh dan terpisahkan oleh hutan Negara. Jarak Pusat Pemerintahan Kecamatan Ayah ke Kabupaten Kebumen kurang lebih 49 km . Untuk Tingkat Pendidikan Penduduk di Kecamatan Ayah berpendidikan SD,SMP,SMA dan Sarjana.Pekerjaan Penduduk di Kecamatan Ayah terdiri dari petani, pedagang,nelayan dan PNS.

## **B. Visi dan Misi Kecamatan Ayah.**

**Visi:** “ Unggul Dalam Sumber Daya Manusia, Prima Dalam Pelayanan”

**Misi:** Untuk menjadikan Kecamatan Ayah sebagai perangkat Daerah yang handal dan profesional serta mampu memberikan pelayanan prima dengan:

- a. Melaksanakan tugas secara tepat waktu, tepat kualitas dan sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Menjadi “ Partner” yang terpercaya bagi instansi tingkat Kecamatan dan Pemerintah Desa serta Masyarakat.
- c. Mengupayakan kemudahan, kecepatan serta adil dalam pelayanan masyarakat

T

## **BAB V. PENUTUP**

Demikian Laporan Keuangan OPD Kecamatan Ayah Tahun anggaran 2022 dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan yang harus dilaksanakan, sebagai konsekuensi dari penggunaan dana APBD, serta sebagai perwujudan akuntabilitas SKPD sebagai sebuah entitas akuntansi /pelaporan.

Kebumen, 31 Desember 2022

CAMAT AYAH

ARIF RAHMADI, S.Sos  
Pembina Tk. I  
NIP. 19671213 199003 1 008